

**EFEKTIVITAS SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN BERBASIS RESIKO
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Ariani Nur Hasanah

NPP. 31.0675

*Asdaf Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan*

Email: arianihasanah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Karno, S.Kom, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of a lack of oversight of the risk-based environmental licensing system that has resulted in environmental degradation in South Kalimantan Province. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the effectiveness of the risk-based environmental licensing system at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of South Kalimantan Province. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method using the theory of effectiveness by Gibson, Ivanevich and Dannely. Data collection techniques were conducted by in-depth interviews (7 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that four of the five indicators based on the effectiveness theory by Gibson, Ivanevich and Dannely are effective. it's just that the production indicator is still experiencing obstacles. **Conclusion:** The risk-based environmental licensing system is effective, but there is still a need for improvement in the production dimension. This is because there are inhibiting factors, namely the environmental licensing system that often experiences interference, lack of public understanding of environmental permits and lack of coordination between agencies. This shortcoming is due to inhibiting factors such as the environmental licensing system which is frequently disrupted, a lack of public knowledge of environmental permits, and a lack of coordination across the authorities. Efforts to overcome these inhibiting factors include manual management, community outreach, and collaboration with environmental government offices. In addition, it is advised that the central government enhance the OSS system, conduct community outreach, and strengthen coordination with environmental offices.

Keywords: *System Effectiveness, risk-based Environmental Licensing System, Online Single Submission*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya pengawasan terhadap sistem perizinan lingkungan berbasis resiko yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem perizinan lingkungan berbasis resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas oleh Gibson, Ivanevich dan Dannely. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (7 informan), dan

dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu empat dari lima indikator berdasarkan teorit efektivitas oleh Gibson, Ivanevich dan Dannelly sudah efektif. hanya saja pada indikator produksi masih mengalami hambatan. **Kesimpulan:** Sistem perizinan lingkungan berbasis resiko sudah efektif, namun masih perlu ada perbaikan pada dimensi produksi. Hal ini karena adanya faktor penghambat yaitu sistem perizinan lingkungan yang sering mengalami gangguan, kurangnya pemahaman masyarakat terkait izin lingkungan dan kurangnya koordinasi antar dinas. Upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat tersebut yaitu sementara mengurus secara manual, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup. Selain itu disarankan kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem OSS, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan koordinasi lebih lanjut kepada dinas lingkungan hidup.

Kata kunci: *Efektivitas Sistem, Sistem Perizinan Lingkungan berbasis resiko, Online Single Submission*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Sumber daya alam ini harus dimanfaatkan dengan baik, jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Namun pada faktanya di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri pada tahun 2017 terdapat sebanyak 425 IUP dari 789 izin keseluruhan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dicabut karena masuk dalam kategori tidak memenuhi CnC. Hal itu menandakan banyak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan. Kerusakan lingkungan tersebut juga yang menyebabkan banyaknya banjir di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun. Kerusakan lingkungan tersebut dapat dicegah dengan melakukan pengelolaan lingkungan yang baik. Aspek pengelolaan lingkungan yang baik di era digital adalah pemanfaatan sistem komunikasi dan teknologi informasi atau information and communications technology (ICT), dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk mendukung program pelestarian lingkungan hidup. (Sardjono,2011:371). Kolaborasi tersebut telah terbentuk pada SPBE, Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah upaya pemerintah untuk mendukung sistem pemerintahan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Arief & Abbas,2021:3).

Bentuk pengawasan dari pengelolaan lingkungan di pemerintahan adalah adanya perizinan lingkungan. Pengertian izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk atau dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan yang diatur dalam perundang-undangan (N.M. Spelt & J.B.J.M ten 3 Berge,1993:2). Pada zaman sekarang perizinan tersebut telah dikolaborasikan dengan teknologi untuk mendukung peningkatan pengelolaan lingkungan yaitu sistem perizinan berbasis resiko yaitu OSS untuk meningkatkan pengawasan dan iklim investasi perizinan. Dengan adanya sistem perizinan lingkungan berbasis resiko ini diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengawasan terhadap lingkungan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang dialami oleh sistem perizinan lingkungan berbasis resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu masih banyaknya perizinan lingkungan yang masih belum terurus, hal ini dapat dilihat pada banyaknya tingkat permintaan perizinan lingkungan yang tidak sebanding dengan jumlah perizinan yang dikeluarkan. Setelah diterapkannya sistem perizinan lingkungan berbasis resiko, tingkat bencana alam

karena kerusakan lingkungan juga masih tinggi, seperti pada tahun 2021 tercatat banjir sebanyak 331 kasus. Selain itu masih banyak perizinan lingkungan yang masih bermasalah di Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan pada tahun 2017 terdapat 425 izin usaha pertambangan dari 789 yang dicabut karena bersifat ilegal dan tidak memenuhi syarat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Komparasi dengan penelitian terdahulu dengan topik efektivitas sistem perizinan lingkungan dijadikan sebagai referensi untuk mendalami penelitian. Penelitian Irni Yustina dan Ahmad Zainuri yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Perizinan Elektronik Cilegon (Sipeci) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon tahun 2022, menemukan bahwa penerapan sistem informasi perizinan sipeci masih kurang efektif dalam mengelola perizinan, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana yang mendukung (Irni Yustiana dkk, 2022).

Penelitian oleh Matthew Delvian Suyana, Fieldo Nurvian Ferdinand dan Renard Kananda Dipta yang berjudul Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Berbasis Resiko Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan tahun 2023, menemukan bahwa pengurusan perizinan lingkungan sangat berdampak pada kepentingan masyarakat terhadap lingkungan, namun kegiatan perizinan masih perlu peningkatan pengawasan (Matthew Delvian dkk, 2023).

Penelitian oleh Roudhotul Fauziya, Muhammad Mas'ud Said dan Hayat yang berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Sambat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat tahun 2023 menemukan bahwa aplikasi pelayanan E-Sambat sudah efektif berdasarkan lima indikator oleh Gibson, Ivanevich dan Dannely yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, Adaptasi dan Perkembangan (Roudhotul Fauziya dkk, 2023).

Penelitian oleh Celsea Yasmin, Febryana Gunawana, Putu Eka Ningsiha dan Ketut Winaya yang berjudul Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Badung tahun 2023, menemukan bahwa efektivitas program berusaha berbasis Online Single Submission (OSS) yang di jalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal berdasar teori Campbell (Gunawan dkk, 2023).

Penelitian oleh Sofi Komalasari Kariadi, Ahmad Riyadh yang berjudul Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPAU) Dalam Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menemukan bahwa Pelayanan perizinan masih belum optimal berdasarkan teori efektivitas Huseini dan Lubis (1987) (Komalasari dkk, 2023).

Penelitian oleh Muhammad Ananda Arif berjudul Efektivitas Layanan Online Sapo Rancak Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang menemukan bahwa dalam penerapannya, aplikasi layanan Sapo Rancak online dapat dikatakan mampu mengurangi kontak langsung antara pemohon izin dan petugas, namun aplikasi ini masih memiliki beberapa kekurangan atau kendala yang membuat aplikasi ini masih belum efektif dan efisien, diantaranya penggunaan aplikasi ini yang tidak dapat diakses (Muhammad Ananda Arief dkk, 2022).

Penelitian oleh Juwita Dewi Br Pohan berjudul Penerapan Online Single Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara melalui sistem Online Single Submission (OSS) secara umum dinilai sangat baik, namun belum mencapai tingkat ideal. Oleh karena itu, DPMPTSP Provinsi Sumut perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga

masyarakat dapat mengurus izin mereka sendiri tanpa perlu melalui perantara atau pihak ketiga (Br Pohan, 2023).

Penelitian oleh Nanang Rohiatna berjudul Implementasi Pelayanan Perizinan Secara Online Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Simpaten/Oss Di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menemukan implementasi kebijakan sudah terlaksana dengan baik namun masih adanya Kendala-dendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu masyarakat yang belum mengerti dan sarana prasarana yang belum memadai, sehingga pelayanan pada masyarakat belum tercapai dan diperlukan juga evaluasi kebijakan secara periodik (Nanang Rohiatna, 2020).

Penelitian oleh Syafrial, Surya Wahyuni dan Novi Yusniati berjudul Efektifitas Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi menemukan pelayanan publik untuk perizinan usaha berjalan efektif melalui program Online Single Submission (OSS) karena lebih memudahkan pemerintah untuk mendata pelaku usaha yang ada di Kota Jambi secara cepat, efisien, dan transparan. Selain itu online Single Submission juga membantu pemilik usaha dalam hal mekanisme pemenuhan komitmen terhadap syarat izin atas sebuah usaha dan juga segala fasilitas mengenai perizinan bisa didapatkan dengan lebih mudah (Syafrial, 2021).

Penelitian oleh Syafriadi berjudul Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menemukan bahwa pelaksanaan Online Sistem Submission di Pekanbaru telah berjalan efektif, dengan indikator tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80 persen dan telah pula mendorong percepatan investasi dengan cepat (Syafriadi, 2023).

1.3. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Persamaan pada penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan memiliki topik yang sama yaitu terkait pelayanan publik. Penelitian sebelumnya menggunakan beberapa teori efektivitas yang berbeda yaitu teori efektivitas oleh Gibson, Campbell, Huseini dan Lubis (2012). Peneliti memilih untuk menggunakan teori efektivitas oleh Gibson dikarenakan teori ini mampu mengungkap fenomena dalam berbagai aspek dalam pemerintahan baik secara individu maupun kelompok, baik secara eksternal maupun internal. Selain itu teori ini juga mempertimbangkan hasil dan proses pada secara objektif. Peneliti dapat menyimpulkan yaitu kesamaan penelitian adalah menggunakan topik yang sama yaitu terkait pelayanan publik dan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif. sedangkan untuk perbedaan pernyataan keterbaruan ilmiah terdapat pada lokus dan fokus penelitian yaitu penelitian ini akan membahas terkait perizinan lingkungan di Dinas PMPTSP di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan teori efektivitas oleh Gibson, Ivanevich, Dannely (2012) dan fokus pada sistem pelayanannya. Sehingga penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya

1.4. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas sistem perizinan lingkungan berbasis resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

II. METODE

Penelitian ini deskriptif kualitatif yang menggambarkan masalah terkait peristiwa di lingkungan peneliti, Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Kepala Seksi Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber daya Alam, Tim Teknis Perizinan Lingkungan Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan 2 Orang dan Staff bagian sumber informasi dan pengaduan di Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan 2 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Sistem Perizinan Lingkungan Berbasis Resiko Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

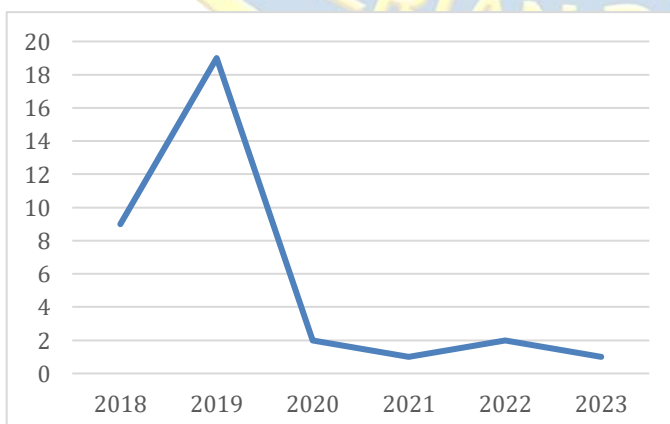
Tujuan sistem pemerintahan elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan pemerintah. Pembangunan SPBE memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan negara dan berdampak pada pembangunan berkelanjutan melalui aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sudirman & Saidin,2022: 54-55). Dalam hal ini peneliti akan membahas terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu Efektivitas Sistem Perizinan Lingkungan Berbasis Resiko. Efektivitas sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian tujuan. Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu). Hasil nyata dibandingkan dengan hasil yang diharapkan (Ismayanti,2015:298). Efektivitas sebagaimana diungkapkan oleh Gibson, Ivanevich dan Dannely mencakup 5 dimensi (Gibson, Ivanevich dan Dannely,2012:315), yaitu Produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Sedangkan Pencapaian efektivitas memuat 4 aspek menurut Stephen P.Robin (Stephen P. Robbin,1994:84), yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi strategis dan pendekatan nilai bersaing.

Penulis menganalisis efektivitas sistem perizinan lingkungan berbasis resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan teori efektivitas oleh Gibson, Ivanevich dan Dannely yang menyatakan bahwa efektivitas dapat terpenuhi dengan lima dimensi yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Adapun pembahasan dari dimensi tersebut sebagai berikut :

3.1.1 Produksi

Produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Penulis melakukan pengukuran terhadap produksi berdasarkan dua indikator yaitu kuantitas perizinan dan permintaan terhadap perizinan. Kuantitas perizinan dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

Gambar 1. Grafik Perizinan Lingkungan yang Disetujui



Berdasarkan grafik di atas jumlah perizinan lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan hal ini dikarenakan perizinan lingkungan merupakan izin yang jarang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan izin tersebut merupakan izin yang beresiko tinggi. Perizinan yang beresiko tinggi merupakan perizinan yang membutuhkan AMDAL dan memiliki skala yang besar. Namun untuk jenis penerbitan izin lingkungan lainnya masih cukup sering. Sedangkan untuk jumlah permintaan perizinan lingkungan semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2. Grafik realisasi perizinan lingkungan 2017-2023



Berdasarkan perkembangan grafik di atas dari tahun 2018-2019 dapat diketahui bahwa jumlah permintaan terhadap perizinan lingkungan cukup tinggi. Hal ini berbeda dengan kuantitas perizinan yang menurun. Hal tersebut mengungkapkan bahwa banyak perizinan yang sebenarnya tidak terproses. Tingginya data permintaan perizinan lingkungan tersebut dikarenakan banyak data yang masih dalam status proses. Pada status proses ini terhenti pada Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup sehingga DPMPTSP tidak bisa menyelesaikan proses penerbitan perizinan.

3.1.2. Efisiensi

Mulyadi mengemukakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut maka dimensi efisiensi memiliki tiga indikator yaitu waktu, biaya dan tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya.

1. Waktu

waktu pengelolaan di DPMPTSP sendiri tidak memiliki masalah tertentu dan berjalan sesuai dengan standar operasional pelayanan yang berlaku. Selain itu kecepatan dari pengurusan izin memiliki batas waktu yang pasti sehingga perizinan dapat berjalan sesuai dengan prosedur. Selain itu, penggunaan OSS untuk menerbitkan perizinan dinilai cukup efektif dan efisien karena lebih cepat dan mampu mengefisienkan waktu dari yang awalnya manual ke digital yang dapat diakses dimana saja.

2. Biaya

Biaya dalam pengurusan perizinan lingkungan ini tidak dipungut biaya sama sekali, namun biaya terletak pada kegiatan operasional dalam pengurusan dokumen tersebut seperti pengurusan data

yang dibutuhkan. Contohnya pada AMDAL untuk membuat dokumen tersebut pemohon ataupun pengusaha biasanya menggunakan jasa konsultan untuk membuat dokumen tersebut.

3. Tenaga Kerja yang Ahli

Tim teknis yang sudah memiliki sertifikasi khusus sehingga pelayanan dapat diberikan dengan optimal dan tidak ada kendala dalam menangani masalah perizinan terkait OSS RBA. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama berada di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan bagian *front office* terkait pelayanan yang diberikan, seluruh staff terlatih untuk memberikan pelayanan dengan baik. Selain itu para staff juga menguasai terkait tata cara mengurus perizinan OSS RBA dengan baik dan mampu memberikan penjelasan serta penyelesaian permasalahan OSS RBA yang dibutuhkan oleh pemohon izin.

3.1.3. Kepuasan

Dimensi kepuasan merupakan ukuran dari tingkat kepuasan ataupun kesesuaian pemenuhan kebutuhan dengan harapan masyarakat. Dimensi ini memiliki empat indikator yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, harga produk dan aksesibilitas produk. Empat indikator ini sudah masuk ke dalam 9 indikator indeks kepuasan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Nilai IKM Berdasarkan Teori Efektivitas Gibson, Ivanevich dan Dannelly

Indikator Kepuasan	unsur pelayanan	nilai pelayanan	rata rata nilai pelayanan	Rata rata nilai indikator
Kualitas Produk	Persyaratan	152	3,8	3,80
	Prosedur	154	3,85	
	Produk Layanan	151	3,775	
Kualitas Pelayanan	Waktu Pelayanan	154	3,85	3,875
	Kompetensi Pelayanan	155	3,875	
	Perilaku Pelaksana	156	3,9	
Harga Produk	Biaya Tarif	156	3,9	3,9
Aksesibilitas Produk	Pengadaan, Saran & Masukan	157	3,925	3,912
	Sarana dan Prasarana	156	3,9	

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas maka dapat diketahui bahwa seluruh indikator pada dimensi kepuasan sudah memiliki predikat sangat baik yang menandakan bahwa tingkat kepuasan pada sistem perizinan lingkungan berbasis resiko ini sudah efektif.

1. Kualitas Produk

Kualitas produk perizinan yang telah diberikan sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh masyarakat, dilihat dari tidak adanya keluhan dari masyarakat terkait perizinan yang diberikan. Selain itu hal ini dapat dilihat juga pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas produk dinilai 3,8 dengan mutu pelayanan “A” dan kinerja yang sangat baik.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat baik. Hal ini juga dapat dilihat pada indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, secara total indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan yaitu 3,875 dengan predikat yang sangat baik.

3. Harga Produk

Harga produk pelayanan perizinan gratis, sehingga tentunya masyarakat sangat puas dengan harga produk yang diberikan.

4. Aksesibilitas Produk

Aksesibilitas pada perizinan lingkungan berbasis resiko ini mudah dijangkau masyarakat. Selain itu aksesibilitas dengan adanya sistem *online* ini lebih mudah dijangkau daripada sistem manual terutama terkait jarak. Dengan menggunakan sistem perizinan lingkungan berbasis resiko, membuat perizinan menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan dimana saja selama website OSS bisa diakses.

3.1.4. Adaptasi

Adaptasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sehingga indikator dari adaptasi yaitu :

1. Kemampuan Dalam Menjawab Perubahan Lingkungan Eksternal

Adaptasi yang dilakukan pada DPMPTSP cukup cepat, hal ini dapat dilihat dari ketanggapan dinas untuk langsung merealisasikan perubahan atau instruksi yang didapatkan dari lingkungan eksternal.

2. Kemampuan Dalam Menjawab Perubahan Lingkungan Internal

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan cukup cepat dalam menghadapi perubahan secara internal. Hal ini didukung dengan kemauan dan kemampuan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

3.1.5. Perkembangan

Perkembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dalam hal ini untuk melakukan perkembangan tentunya faktor yang terpenting adalah sumber daya yang dimiliki oleh dinas tersebut harus dikembangkan. Indikator Perkembangan yaitu :

1. Tingkat Kepuasan Pegawai

Pegawai sangat puas bekerja di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini didukung dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana memadai dan suasana lingkungan yang nyaman.

2. Kinerja Pegawai

kinerja pegawai pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat baik dan sesuai dengan standar yang ada sehingga tidak ada keluhan terkait kinerja pegawai di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Sarana dan Prasarana

sarana dan prasarana pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat lengkap dan memadai.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sistem perizinan lingkungan berbasis resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah kegiatan perizinan dan pengawasan lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa perizinan lingkungan adalah bentuk dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Efektivitas perizinan lingkungan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan teori Gibson yang dinilai berdasarkan 5 dimensi yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan sudah dapat dinilai sudah efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa

4 dari 5 indikator yaitu efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan sudah efektif, namun pada bagian indikator produksi perlu adanya perbaikan terkait akses ke website OSS RBA dan koordinasi dengan masyarakat maupun dinas terkait mengenai keperluan terhadap perizinan tersebut agar data terkait perizinan lingkungan lebih riil sesuai kebutuhan masyarakat dan terealisasi sepenuhnya. Hal ini mirip dengan temuan penelitian sebelumnya dimana perizinan lingkungan ini sebenarnya masih banyak belum dipahami dan dipedulikan masyarakat. Pada penelitian Irna Yustina dan Ahmad Zainuri dengan aplikasi Cilegon menyatakan bahwa perizinan masih kurang sosialisasi dan sarana prasarana yang mendukung. Dengan adanya sistem perizinan lingkungan ini diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan lingkungan dengan lebih baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dari kegiatan perizinan lingkungan berbasis resiko ini yaitu masih sering terjadi kesalahan sistem saat mengakses website OSS RBA, masyarakat sendiri masih kurang mengerti cara menggunakan OSS RBA, dan kurangnya koordinasi antar dinas dalam mengelola perizinan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas perizinan lingkungan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan teori Gibson yang dinilai berdasarkan 5 dimensi yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan sudah dapat dinilai sudah efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa 4 dari 5 indikator yaitu efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan sudah efektif, namun pada bagian indikator produksi perlu adanya perbaikan terkait akses ke website OSS RBA dan koordinasi dengan masyarakat maupun dinas terkait mengenai keperluan terhadap perizinan tersebut agar data terkait perizinan lingkungan lebih riil sesuai kebutuhan masyarakat dan terealisasi sepenuhnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perizinan lingkungan berbasis resiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, orang tua saya, dua saudari saya yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan, Kepada Bapak Dr. Karno, S.Kom, M.Si, selaku dosen pembimbing peneliti, atas dedikasinya yang telah membimbing dengan tulus dan ikhlas dalam membagikan ilmunya, kepada rekan-rekan prajaku, dan teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memotivasi peneliti, sehingga karya tulis ini bisa selesai tepat waktu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., & Abbas, M. Y. 2021. "Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Vol. 8.
- Br Pohan, J. D. (2023b). Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas

- Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1, 22–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/moneter.v1i4.33>
- Gibson J. L. Ivancevich J. M. Donnelly J. H. & Konopaske R. 2012. *Organizations : behavior structure processes* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Gunawan, Celsea & Purnamaningsih, Putu & An, I Ketut. (2023). Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *Business and Investment Review*. 1. 9-14. 10.61292/birev.v1i4.34.
- Ismayanti, L. 2015. “Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Malang”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 2.
- Komalasari Kariadi, S., & Riyadh UB, A. (2022). Effectiveness of Integrated Licensing Service Information System Services (SIPPAU) in application for building permits (IMB). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v19i0.1234>
- Matthew Delvian Suyana, F. N. F. K. D. 2023.” Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup Berbasis Risiko Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 9, 303–308.
- Muhammad Ananda Arif, Rahmat Saleh, Rio Delfiro, Rizi Fadel Afifi, Wahyu Yendra, & Syamsir Syamsir. (2022). Efektivitas layanan online sapo Rancak Pada Dinas penanaman modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Padang. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN, BAHASA, SASTRA, SENI, DAN BUDAYA*, 1(2), 70–79. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v1i2.133>
- Nanang Rohiatna. (2020). Implementasi Pelayanan Perizinan Secara online melalui sistem INFORMASI Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIMPATEN/Oss) Di Kecamatan bandung kidul Kota bandung provinsi Jawa Barat. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 515–538. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i3.296>
- Robbins, Stephan P. 1994. *Teori Organisasi struktur, desain dan aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Roudhotul Fauziya, M. M. S. H. 2023.. Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Sambat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Pasuruan). *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Sardjono, W. 2011. “Model Pelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Teknologi Informasi Pada Aktivitas Sosialisasi Berbasis Masyarakat Sebagai Sentra Partisipan.” *Comtech*, Vol. 2
- Spelt N. M. Berge J. B. J. M. ten & Hadjon P. M. 1993. Pengantar hukum perizinan. Surabaya: Yuridika.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44–58.
- Syafriadi, S. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Online single submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan publik pekanbaru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2018. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1081–1088. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2547>
- Syafrial, S. (2021). Efektifitas online single submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi. *Tanah Pilih*, 1(2), 108–124. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i2.808>
- Irni Yustina, Ahmad Zainuri. 2022. “Efektivitas sistem informasi perizinan elektronik cilegon (sipeci) di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kota cilegon(studi kasus: aplikasi sipeci dpmptsp kota cilegon)”. *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, 87-103.